

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER
REGIONAL III BANDAR LAMPUNG**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023



**JL. UNTUNG SUROPATI NO. 2 LABUHAN RATU – KEDATON
BANDAR LAMPUNG**

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2023



Kepala Balai,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Surapati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjenmak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 31 Desember 2023

Kepala Balai,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 6.282.767.758,00 atau mencapai 206% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 3.050.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 32.086.608.435,00 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 32.411.945.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 109.434.402,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 919.518.150,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 107.432.884.252,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 1.082.000.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing - masing sebesar Rp. 1.155.091.241,00 dan Rp. 109.434.402,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.018.441.450,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 35.897.112.209,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -29.878.670.759,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing - masing sebesar Surplus Rp. 264.326.306,00 dan Defisit Rp. -29.614.344.453,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -29.614.344.453,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 112.089.814.935,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -29.614.344,453,00 kemudian ditambah / dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 25.803.840.679,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 108.279.311.161,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III
BANDAR LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Kategori	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	3.050.000.000,00	6.282.767.756,00	206	4.246.693.294,00
Jumlah Pendapatan		3.050.000.000,00	6.282.767.756,00	206	4.246.693.294,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.246.377.000,00	4.186.585.562,00	99	4.258.249.942,00
Belanja Barang	B.4.	26.644.608,00	26.381.789.123,00	99	35.312.961.156,00
Belanja Modal	B.5.	1.520.960.000,00	1.518.233.750,00	100	136.946.763,00
Jumlah Belanja		12.411.945.000,00	12.086.608.435,00	99	39.708.157.861,00

II. NERACA

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III
BANDAR LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	567.780.735,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2.	0,00	2.750.100.000,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.5.	0,00	0,00
Persediaan	C.1.6.	919.518.150,00	781.326.147,00
Jumlah Aset Lancar		919.518.150,00	4.099.206.882,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	91.332.704.000,00	91.332.704.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	34.160.225.356,00	32.550.920.606,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	13.395.410.000,00	13.395.410.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.420.692.940,00	2.420.692.940,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	21.865.000,00	21.865.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-33.898.013.044,00	-31.076.451.266,00
Jumlah Aset Tetap		107.432.884.252,00	108.646.141.280,00
Aset Lainnya			
Dana yang dibatasi Penggunaannya	C.3.1.	1.082.000.000,00	0,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	1.650.000,00	92.721.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-1.650.000,00	-92.721.000,00
Jumlah Aset Lainnya		1.082.000.000,00	0,00
Jumlah Aset		109.434.402.402,00	112.744.348.162,00
Kewajiban			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	1.155.091.241,00	86.752.492,00
Utang Muka dari KPPN	C.4.2.	0,00	567.780.735,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.155.091.241,00	654.533.227,00
Jumlah Kewajiban		1.155.091.241,00	654.533.227,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	108.279.311.161,00	112.089.814.935,00
Jumlah Ekuitas		108.279.311.161,00	112.089.814.935,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		109.434.402.402,00	112.744.348.162,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III
BANDAR LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Subitem	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	5.018.441.450,00	3.973.601.760,00
JUMLAH PENDAPATAN		5.018.441.450,00	3.973.601.760,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4.189.066.037,00	4.277.116.942,00
Beban Persediaan	D.3	5.074.531.206,00	14.576.884.162,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.800.039.730,00	5.370.066.868,00
Beban Pemeliharaan	D.5	2.381.713.088,00	3.709.013.948,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.723.898.290,00	4.988.275.323,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	11.997.405.000,00	8.752.238.800,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.730.490.776,00	2.821.399.150,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		35.897.112.209,00	44.485.015.193,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-29.878.670.759,00	-40.511.413.433,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0,00	0,00
Pendapatan dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	264.328.308,00	35.011.534,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		264.328.308,00	35.011.534,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-29.614.344.451,00	-40.476.401.899,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL III
BANDAR LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	112.089.814.935,00	117.048.887.607,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-29.814.344.453,00	-40.486.401.899,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	25.803.840.679,00	35.520.100.947,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-3.810.503.774,00	-4.959.072.672,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	108.279.311,00	112.089.814.935,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Untung Suropati no. 2 Labuhan Ratu, Kedaton - Bandar Lampung.

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya status kesehatan hewan dan pelayanan veteriner serta sistem informasi penyakit hewan yang maju, efektif dan efisien.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

(1) **Pendapatan - LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) **Pendapatan - LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
RUPIAH MURNI		
Belanja Pegawai		
Belanja Gaji Pokok PNS	2.842.012.000,00	2.797.051.000,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.000,00	47.000,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	218.652.000,00	215.497.000,00
Belanja Tunj. Anak PNS	68.844.000,00	64.484.000,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	25.200.000,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	412.330.000,00	391.100.000,00
Belanja Tunj. PPh PNS	43.271.000,00	18.323.000,00
Belanja Tunj. Beras PNS	173.272.000,00	169.979.000,00
Belanja Uang Makan PNS	447.742.000,00	395.226.000,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	55.885.000,00	51.470.000,00
Belanja Uang Lembur	120.000.000,00	120.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	4.407.255.000,00	4.246.377.000,00
Belanja Barang		
Belanja Keperluan Perkantoran	902.452.000,00	850.405.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	296.920.000,00	212.704.000,00
Belanja Honor Operasional Satker	195.000.000,00	217.880.000,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	9.600.000,00	1.100.000,00
Belanja Bahan	421.950.000,00	709.036.000,00
Belanja Honor Output Kegiatan	43.500,00	39.120.000,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	317.750.000,00	700.703.000,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.726.636.000,00	6.143.241.000,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	29.400.000,00	0,00

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Belanja Langganan Listrik	540.000.000,00	757.138.000,00
Belanja Langganan Telepon	4.920.000,00	3.120.000,00
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	135.800.000,00	125.900.000,00
Belanja Jasa Pos dan Giro	15.006.000,00	16.006.000,00
Belanja Sewa	110.000.000,00	46.850.000,00
Belanja Jasa Profesi	98.000.000,00	192.940.000,00
Belanja Jasa Lainnya	42.000.000,00	64.547.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.560.000,00	302.195.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	319.066.000,00	277.764.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan	64.450.000,00	43.575.000,00
Belanja Perjalanan Biasa	2.434.138.000,00	2.822.557.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000,00	24.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.560.000,00	1.090.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	510.231.000,00	1.064.870.000,00
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	9.792.500.000,00	9.268.302.000,00
Jumlah Belanja Barang	20.083.039.000,00	23.883.643.000,00
Belanja Modal		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	916.174.000,00
Jumlah Belanja Modal	0,00	916.174.000,00
Jumlah Rupiah Murni	24.490.294.000,00	29.046.194.000,00
PNBP		
Belanja Barang		
Belanja Bahan	188.775.000,00	356.303.000,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.500.000,00	25.050.000,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	400.298.000,00	286.258.000,00
Belanja Jasa Profesi	30.600.000,00	38.700.000,00
Belanja Jasa Lainnya	476.500.000,00	28.768.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	136.371.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.600.000,00	432.775.000,00
Belanja Perjalanan Biasa	388.825.000,00	590.120.000,00

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setor Revisi
Belanja Honor Output Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	381.400.000,00	413.488.000,00
Belanja Sewa	0,00	60.000.000,00
Jumlah Belanja Barang	2.043.498.000,00	2.760.988.000,00
Belanja Modal		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	604.786.000,00
Jumlah Belanja Barang	0,00	604.786.000,00
Jumlah PNB	2.043.498.000,00	3.365.751.000,00
TOTAL	28.533.792.000,00	32.411.946.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.282.767.756,00 atau mencapai 206% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.050.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	8.972.000,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	3.050.000.000,00	5.823.977.750,00	190,95
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0,00	846.000,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	184.645.700,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu	0,00	2.980.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun yang lalu	0,00	281.346.306,00	0,00
Jumlah	3.050.000.000,00	6.282.767.756,00	205,99

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 berupa :

1. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp. 8.972.000,00 berasal dari :
 - a. Sewa rumah dinas PNS dengan rincian :
 - Type A Rp. 114.000,- x 1 unit = Rp. 14.000,00
 - Type C Rp. 56.000,- x 5 unit = Rp. 280.000,00
 - Type D Rp. 40.000,- x 4 unit =Rp. 160.000,00
 - Type E Rp. 29.000,- x 2 unit = Rp. 58.000,00
 - Jumlah Rp. 612.000,- x 12 bulan = **Rp. 7.344.000,00**
 - b. Sewa Aula Balai Veteriner Lampung **Rp. 456.000,00**
 - c. Sewa kantin Dharma Wanita Balai Veteriner Lampung **Rp. 582.000,00**
 - d. Sewa Gedung KPRI Sejahtera Balai Veteriner Lampung **Rp. 590.000,00**
2. Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya sebesar **Rp. 5.823.977.750,00**
3. Pendapatan Jasa Pengawasan/pemeriksaan sebesar **Rp. 846.000,00** berupa pendapatan jasa layanan pengujian dan analisis seretifikasi
4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar **Rp. 184.645.700,00.**
5. Penerimaan kembali Pegawai Barang Tahun Yang Lalu sebesar **Rp. 2.980.000,00** berasal dari pengembalian belanja pegawai tahun lalu
6. Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Yang Lalu sebesar **Rp. 261.346.306,00** berasal dari pengembalian belanja barang tahun lalu

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	-%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.972.000,00	10.632.000,00	-15,61
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	0,00	1.200.000,00	-100
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	5.823.977.750,00	3.943.204.000,00	47,69
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	846.000,00	1.774.000,00	-52,31
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	2.600.000,00	-100
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	184.845.700,00	252.271.760,00	-26,72
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu	2.980.000,00	12.516.534,00	-76,19
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun yang lalu	281.348.306,00	22.495.000,00	1061,8
Jumlah	6.282.767.756,00	4.246.693.294,00	47,94

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,94% dibandingkan TA 2022 di karenakan :

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda Indonesia yang di awali bulan Mei 2022 dengan adanya wabah PMK ini berakibat terhadap penutupan daerah baik masuk maupun keluar dari suatu daerah. Namun berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satgas PMK yakni oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di perbolehkan adanya lalu lintas ternak dengan persyaratan teknis tertentu. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Balai Veteriner Lampung mengeluarkan Nota Dinas Nomor B.26002/PK.310/F5.C/07/2022 akan memberikan panduan terhadap proses persyaratan sampel yang mewakili dari ternak yang akan di lalulintaskan. Kondisi demikian membuat banyaknya yg menguji untuk persyaratan lalu lintas.

8.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 32.086.608.435,00 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 32.411.945.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.246.377.000,00	4.186.585.562,00	99
Belanja Barang	26.644.808.000,00	26.381.789.123,00	99
Belanja Modal	1.520.960.000,00	1.518.233.750,00	100
Total Belanja Kotor	32.411.945.000,00	32.087.153.843,00	99
Pengembalian Belanja	0,00	545.408,00	0,00
Total Belanja	32.411.945.000,00	32.088.608.435,00	99,00

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 19,19% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

Karena pagu belanja tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yaitu untuk ternak ruminansia potong pengadaan ternak sapi potong lokal dan Ternak unggas dan Aneka ternak pengadaan ayam lokal.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	%
Belanja Pegawai	4.186.585.562,00	4.258.249.942,00	-01,68
Belanja Barang	26.381.789.123,00	35.312.961.158,00	-25,29
Belanja Modal	1.518.233.750,00	136.946.783,00	1008,83
Total Belanja	32.086.608.435,00	39.708.157.881,00	-19,19

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.186.585.562,00 dan Rp. 4.258.249.942,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 01,68% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Karena adanya 1 orang Aparatur Sipil Negara purnabakti.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.067.398.970,00	4.139.619.942,00	03,59
Belanja Lembur	119.732.000,00	120.000.000,00	-00,22
Jumlah Belanja Kotor	4.187.130.970,00	4.259.619.942,00	-01,67
Pengembalian Belanja Pegawai	545.408,00	370.000,00	47,40
Jumlah Belanja	4.186.585.562,00	4.258.249.942,00	-01,68

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.381.789.123,00 dan Rp. 35.312.961.156,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar -20,78% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Karena pagu belanja barang tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 untuk pengadaan ternak sapi potong lokal dan ayam lokal (bantuan pemerintah).

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Keperluan Perkantoran	849.297.500,00	878.663.000,00	-33,34
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	212.647.000,00	276.120.000,00	-22,98
Belanja Honor Operasional Satker	217.880.000,00	200.370.000,00	08,73
Belanja Barang Operasional Lainnya	400.000,00	1.200.000,00	-66,66
Belanja Bahan	1.038.290.301,00	1.467.136.000,00	-29,23
Belanja Honor Output Kegiatan	51.120.000,00	60.040.000,00	-14,85
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	723.406.107,00	1.135.726.000,00	-36,30
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.408.387.126,00	2.275.023.000,00	181,68
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0,00	14.454.251.000,00	-100
Belanja Langganan Listrik	756.531.516,00	616.296.000,00	22,75
Belanja Langganan Telepon	3.116.492,00	4.920.000,00	-36,65
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	125.767.096,00	125.500.000,00	0,21
Belanja Jasa Pos dan Giro	16.005.775,00	31.126.000,00	-48,57
Belanja Sewa	108.150.000,00	40.800.000,00	165,07
Belanja Jasa Profesi	230.800.000,00	177.500.000,00	30,02
Belanja Jasa Lainnya	484.769.669,00	203.800.000,00	128,27
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	438.009.000,00	32.853.000,00	1233,23
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	709.117.961,00	365.994.000,00	93,75
Belanja Pemeliharaan Jaringan	43.227.290,00	24.819.000,00	74,17
Belanja Perjalanan Biasa	3.236.558.378,00	2.985.955.000,00	08,39
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.770.065,00	19.600.000,00	11,07
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	630.290.000,00	-100
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.465.537.827,00	1.162.459.000,00	26,07
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dlm bentuk barang	9.261.000.000,00	7.197.124.000,00	28,67
Jumlah Belanja Kotor	26.381.789.123,00	33.329.224.563,00	-20,84
Pengembalian Belanja Barang	0,00	25.117.500,00	-100
Jumlah Belanja	26.381.789.123,00	33.304.107.063,00	-20,78